

PEMODELAN KEBIJAKAN PUBLIK: TINJAUAN DAN ANALISIS UNTUK RISALAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

(PUBLIC POLICY MODELING: OVERVIEW AND ANALYSIS FOR GOVERNMENT POLICY BRIEF)

Lesmana Rian Andhika

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Aceh Tenggara
Kantor Bupati Aceh Tenggara, Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane-Aceh Tenggara 24651
Email: lesmana.ra@gmail.com

Diterima: 23 Oktober 2019; Direvisi: 13 November 2019; Disetujui: 25 November 2019

ABSTRAK

Artikel penelitian ini menyajikan pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan, dan menentukan rekomendasi untuk pilihan kebijakan secara politis. Pemodelan dalam kebijakan dapat mengenali perubahan struktur kebijakan secara eksogen terhadap obyek kebijakan. Pemodelan dalam risalah kebijakan menginformasikan keputusan kebijakan yang didasari oleh fenomena masalah tertentu atau keseluruhan, dan kebutuhan untuk mempercepat perubahan mendasar menuju analisis kebijakan yang lebih dinamis. *Meta-theory (the analysis of theory)* digunakan untuk meninjau dan menganalisis pemodelan kebijakan yang terdapat pada risalah kebijakan dari beberapa temuan literatur yang relevan. Artikel penelitian ini menunjukkan bahwa pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan isu masalah yang kompleks, memilih model, menentukan pemodelan berdasarkan input pemodelan, dan objek kebijakan. Pemodelan dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi sistem pengaturan kepentingan pemerintah yang sangat kompleks. Keuntungan dan kerugian dari implementasi kebijakan mesti diperhatikan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan norma dan sampai kepada tujuannya. Oleh karena itu risalah kebijakan dapat merangsang pengajuan kebijakan yang berkualitas, dengan pemodelan kebijakan sebagai alat memberikan rekomendasi yang tepat terhadap pilihan kebijakan. Disamping itu risalah kebijakan yang ditulis oleh para peneliti dan akademisi menjadi alternatif informasi primer bagi pembuat kebijakan. Akhirnya bagi peneliti masa depan, minimal artikel ini dapat menjadi penelitian pendahuluan (*preliminary research*) agar dapat menguraikan pemodelan kebijakan dalam konteks empiris.

Kata kunci: Risalah kebijakan, Kebijakan publik, Pembuat kebijakan, Pemerintah

ABSTRACT

This research article presents policy modeling in policy briefs, and determines the recommendation for political policy option. Modeling in policy can recognize changes in a policy structure exogenous towards the policy object. Modeling in policy briefs informs policy decisions that are based on the phenomenon of a particular or overall problem, and the need to accelerate fundamental changes towards more dynamic policy analysis. Meta-theory (the Analysis of theory) is used to review and analyze the policy modeling contained in the policy brief of some relevant literature. This research article describes that policy modeling must be carried out with complex problem issues, selecting models, determining to a model based on modeling inputs, and policy objects. Modeling is seen as a necessity in the face of a very complex system of regulating government interests. The advantages and disadvantages of implementing the policy must be considered, so that the policy in accordance with the norms for reach its objectives. Therefore policy briefs can stimulate a quality policy submissions, with policy modeling as a tool providing appropriate recommendations for policy choices. In addition, the policy briefs are written by researchers and academics become alternative primary information for policy makers. Finally, for future researchers, at least this article can be a preliminary research in order to describe policy modeling in an empirical context.

Keywords: Policy briefs, Public policy, Policymakers, Government

PENDAHULUAN

Thomas R. Dye (2013:3) memberikan argumentasi bahwa kebijakan publik didefinisikan *...is whatever governments choose to do or not to do*. Bila mengikuti definisi seperti ini maka terlalu singkat untuk memberikan alasan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan. Lebih luas dari pada itu para akademisi dan praktisi telah meletakkan dasar untuk memahami maksud dari setiap kebijakan pemerintah ditetapkan. Walaupun tidak ada suara bulat dapat ditemukan dari beberapa literatur pada definisi yang tepat dari kebijakan publik (lihat lebih lanjut Hill, 2005; Kay, 2006; Cochran & Malone, 2014; Dunn, 2016). Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik, dan menjadi studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk menangani masalah publik (Cochran & Malone, 2014:23-27; Estrada & Park, 2018).

Kebijakan dirancang sebagai tanggapan terhadap masalah yang dirasakan, disaring melalui proses kebijakan khusus (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019), diadopsi (Minkman, Buuren, & Bekkers, 2018), diimplementasikan (Fowler, 2018) melalui undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan oleh lembaga publik. Kebijakan memberikan panduan kepada pemerintah tentang berbagai tindakan dan juga menyediakan hubungan akuntabilitas timbal balik antara pemerintah dan warga nya. Individu dan kelompok berupaya membentuk kebijakan publik melalui mobilisasi kelompok kepentingan, pendidikan advokasi, dan lobi politik (Cochran & Malone, 2014:25-35). Kebijakan pemerintah menjadi pedoman bagi kegiatan atau program pemerintah yang mesti dipatuhi oleh instansi pelaksana.

Maka untuk kepentingan politis risalah kebijakan (*policy brief*) menjadi penting untuk menganalisis dan mengevaluasi setiap usulan produk kebijakan (Dunn, 2016:403; Jagers, Matti, & Nordblom, 2019). Selain itu, risalah kebijakan adalah bentuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian yang inovatif. Keuntungan pedagogis lebih lanjut termasuk membantu seorang analis kebijakan dalam membangun kemampuan pengembangan sumber daya, meningkatkan integritas dan kualitas dalam proses menganalisis dan mengevaluasi setiap "model kebijakan" (Estrada & Yap, 2013; Estrada & Park, 2018; Fuentes, Tessone, & Furtado, 2019). Keepnews (2016) menekankan bahwa risalah kebijakan yang berguna mengacu pada keahlian dari organisasi atau lembaga yang menerbitkannya umum nya menyajikan bukti yang relevan. Sebuah dokumen risalah kebijakan akan memberikan penjelasan ringkas dan analisis isu kebijakan atau masalah, bersama-sama dengan pilihan kebijakan dan rekomendasi.

Seperti misalnya, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan meluncurkan dokumen risalah kebijakan pada 2017 tentang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data Kemiskinan di Indonesia, salah satu faktor utama masalah nya adalah karena tata kelola untuk manajemen data yang tidak transparan dan terintegrasi (Hadna & Kutanegara, 2017). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 membuat dua dokumen risalah kebijakan berdasarkan hasil penelitian bagi pemerintah tentang belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga ahli lokal yang sangat dipengaruhi oleh alih pengetahuan dari Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Tenaga Kerja Lokal (TKL) serta pengembangan kebijakan teknologi industri. Faktor utama dari kedua risalah kebijakan ini adalah kelemahan dari sistem implemetasi, dan ketiadaan tindakan yang diperlukan untuk mengelola proses kebijakan dan relasi inter-organisasional (LIPI, 2018).

Beberapa studi yang pernah dipublikasikan memberikan informasi yang berharga untuk memahami pemodelan kebijakan untuk risalah kebijakan, Downes & Killeen (2013) memberikan informasi dari hasil studi nya bahwa risalah kebijakan dapat menyebarluaskan pelajaran kepada para pembuat kebijakan, dan kesimpulan ditargetkan dari literatur yang relevan (penelitian mutakhir), memungkinkan penulis risalah kebijakan untuk dapat mendukung rekomendasi yang ingin dibuat. Hepburn, Pless, & Popp (2018) dalam studi nya

menemukan bahwa dalam setiap model kebijakan (yang dibuat dalam rekomendasi risalah kebijakan) harus mempertimbangkan keuntungan dan kemungkinan efek kegagalan. Estrada & Park (2018) menemukan bahwa pemodelan kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian akademik, yang didukung oleh penggunaan teori dan teknik analisis untuk mengevaluasi masa lalu (penyebab) dan masa depan (efek) dari kebijakan apapun pada masyarakat, dimana saja dan kapan saja. Juga kebijakan sebagai instrumen teoritis atau teknis yang diformulasikan untuk memecahkan masalah tertentu, dan mempengaruhi langsung atau tidak langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pemodelan kebijakan yang terdapat pada risalah kebijakan (*policy brief*). Walaupun telah banyak penelitian yang menulis tentang risalah kebijakan yang telah dipublikasikan, pada umumnya risalah kebijakan tersebut hanya menjelaskan cara menulis, bagaimana konteksnya, perkembangan risalah kebijakan, dan penggunaan risalah kebijakan pada institusi pemerintah. Namun hanya terbatas untuk mengidentifikasi pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan. Artikel penelitian ini diposisikan untuk mengidentifikasi risalah kebijakan dengan mengevaluasi dan menganalisis model dan pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan pemerintah dari sumber sekunder yang teridentifikasi. Beberapa penjelasan dapat menjadi bahan untuk menyusun rumusan masalah artikel penelitian ini. Misalnya model kebijakan yang direkomendasikan dalam risalah kebijakan pada umumnya mengadopsi model kebijakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu risalah kebijakan yang ditulis oleh para akademisi sering menjadi sumber rujukan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan. Oleh sebab itu pertanyaan penelitian yang relevan adalah bagaimana pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan pemerintah?

METODE

Penelitian ini menggunakan *synthesis of qualitative research (meta-study)*, Barnett & Thomas (2009) menjelaskan, *meta-study* mempunyai tiga komponen analisis yakni *meta-data-analysis (the analysis of findings)*, *meta-method (the analysis of methods)*, and *meta-theory (the analysis of theory)*. Lebih spesifik kepada *meta-theory (the analysis of theory)*, fungsi *meta-theory* tidak hanya membatasi, dan mempertahankan konsep-konsep teoritis, tetapi juga untuk melakukan hal yang sama sehubungan dengan metode investigasi, analisis, dan deskriptif teori itu sendiri (Overton & Müller, 2013:19-25). *Meta-theory* bisa digunakan untuk mengidentifikasi kerangka teori yang berhubungan dengan teori-teori sosial, sejarah, budaya dan politik (Paterson, et.al, 2001:10).

Jadi artikel penelitian ini berfokus untuk menganalisis teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk itu informasi sekunder didapatkan dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, karya penelitian, *website*, dan laporan. Tabel, angka, garis, gambar, juga digunakan untuk memperkuat realitas argumentasi yang dibangun. Selain dari pada itu untuk mengembangkan argumentasi yang tepat, beberapa kasus yang pernah dipublikasikan dipilih secara sengaja dan perlakukan sebagai bukti dalam artikel penelitian ini.

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka langkah-langkah *meta-theory* dalam artikel penelitian ini mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Zhao (1991) yaitu, 1). *restudying the same phenomenon that was previously studied (replication, for example)* and 2). *studying the results and the processes of the previous studies*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikhtisar Risalah Kebijakan (*Policy Brief*)

Kemunculan risalah kebijakan sebagai upaya untuk merespon proses dan *output* kebijakan yang tidak bermutu, mencapai tujuan sebagai instrumen negara untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kondisi ini berkembang karena adanya indikasi pragmatisme dalam proses

perumusan kebijakan, yakni kecenderungan mencari cara instan terhadap permasalahan yang timbul. Di sisi yang lain para pembuat kebijakan seperti nya kurang menghargai riset kebijakan yang dihasilkan dari berbagai penelitian sebagai salah satu sumber informasi primer (Utomo, 2017).

Risalah kebijakan merupakan bagian yang semakin penting, dan digunakan untuk advokasi kebijakan pemerintahan dan organisasi non-pemerintah (Conaway, 2013). Meskipun risalah kebijakan sangat bervariasi, tema umum tertentu menawarkan panduan yang jelas. *Pertama*, agar risalah kebijakan bernilai bagi pembaca, fokusnya harus sempit, apabila berupaya membahas topik yang luas berisiko kehilangan perhatian bagi para pembaca (pembuat kebijakan). *Kedua*, risalah kebijakan seharusnya tidak berusaha memberikan tinjauan mendalam dari literatur yang relevan karena risalah kebijakan bukan ulasan literatur akademik (Downes & Killeen, 2013). Risalah kebijakan berisi analisis terhadap isu aktual dan permasalahan yang dihadapi, serta usulan/rekomendasi yang inovatif untuk mengatasi masalah yang ada sekaligus untuk mencegah agar permasalahan yang sama tidak muncul di kemudian hari (Utomo, 2017).

Setidaknya dalam menulis risalah kebijakan berisi:

- a. Judul (judul yang dapat menarik pembaca);
- b. Ringkasan eksekutif (apa yang didapat oleh para pembaca, bagian ini berfokus memuat jawaban / **APA** akar masalah, **MENGAPA** dinilai sebagai masalah yang penting dan strategis, **BAGAIMANA** solusinya, oleh **SIAPA** solusi tersebut dilaksanakan);
- c. Deskripsi masalah (masalah harus dapat dijelaskan secara spesifik);
- d. Rekomendasi kebijakan (merupakan substantif dari risalah kebijakan / kualitas dari rekomendasi sangat menentukan risalah kebijakan);
- e. Kesimpulan;
- f. Apendiks atau lampiran (*optional*);
- g. Daftar pustaka.

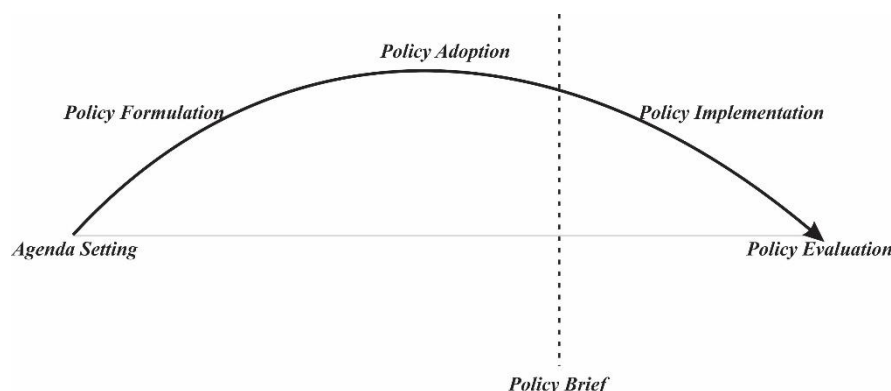
Risalah kebijakan di susun secara ringkas, jelas dan bukan ringkasan dari dokumen lain, berisi rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dianggap penting atau strategis. Ringkasan kebijakan dibutuhkan pemerintah untuk menghimpun informasi berkualitas sebagai basis kebijakan. Banyak institusi pemerintah yang berpengalaman membuat kebijakan yang berkualitas, untuk itu institusi pemerintah lain juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas kebijakan mereka. Di sisi yang lain pengambil kebijakan selalu membutuhkan data dan informasi yang spesifik (ulasan yang singkat; mudah dipahami; ditulis dalam bahasa non-teknis; dari laporan yg fokus memuat implikasi atau rekomendasi kebijakan). Walaupun risalah kebijakan lebih cenderung kepada keputusan politis, setidaknya risalah kebijakan memberikan pilihan kebijakan kepada para pembuat kebijakan untuk diimplementasikan.

Oleh sebab itu ringkasan kebijakan mesti berbasis bukti, menyatukan bukti penelitian global (dari tinjauan sistematis) dan bukti lokal untuk menginformasikan musyawarah (dialog kebijakan) tentang kebijakan. Dimulai dari deskripsi masalah kebijakan, merangkum bukti terbaik yang tersedia untuk mengklasifikasikan sifat masalah, menjelaskan kemungkinan dampak dari opsi-opsi utama untuk mengatasi masalah. Mempertimbangkan hambatan potensial untuk pelaksanaan opsi-opsi utama, dan juga termasuk cara mengatasi hambatan yang mungkin saja terjadi. Beberapa studi tertulis memberikan keterangan terhadap manfaat risalah kebijakan, diantaranya, advokasi proses kebijakan (Young & Quinn, 2017); sumber informasi dari ringkasan obyektif dari penelitian (Smith, 2018); sebagai salah satu strategi bagi pemerintah untuk memutuskan berbagai kegiatan (Coning et al., 2010). Ringkasan kebijakan ditulis untuk berbagai pelaku kebijakan, untuk siapa ringkasan kebijakan seharusnya ditulis tergantung pada tujuan spesifik dan tingkat penerapannya, misal nya, lokal, nasional, regional

atau swasta. Menemukan aktor kebijakan yang tepat untuk ditargetkan sangat penting memastikan bahwa ringkasan kebijakan yang di tulis akan di baca (Action, 2018).

Model Kebijakan

Model digunakan untuk membangun asumsi-asumsi yang sifat nya spesifik terkait seperangkat parameter dan variabel tertentu secara spesifik (Santoso, 2010:13). Membuat klasifikasi dan pengelompokan disebut dengan modeling (penentuan model). Model secara umum diartikan sebagai sebuah konsep untuk independen, dari, tetapi paralel dengan realitas yang dibayangkan (lihat lebih lanjut Hill, 2005). Meskipun beberapa praktisi dan akademisi membedakan antara *policy study* dengan *policy analysis*, namun terdapat persamaan yang dapat dipahami bahwa kedua kegiatan tersebut sama-sama memberikan pelajaran bagaimana merancang, dan menulis kebijakan (Smith, 2018:5-10). Dalam definisi Dunn (2016:31-35) *policy study* maupun *policy analysis* diartikan sebagai aktivitas menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan. Lebih lanjut kebijakan publik bukan hanya sekedar kalimat yang tertera, dan bersifat mengatur, tapi kebijakan publik harus di desain agar dapat berlaku efektif terhadap objek kebijakan itu sendiri. Dunn (2016:42) memberikan keterangan bahwa kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang bersifat politis. Proses itu menerangkan serangkaian tahap yang saling bergantung antara *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, and *policy evaluation*. Sebelum kebijakan diberlakukan, pada umumnya kebijakan tersebut akan diberikan peninjauan ulang yang berisi rekomendasi kebijakan untuk dipilih secara rasional oleh pembuat kebijakan, divisualisasikan pada gambar 1.



Gambar 1. Proses Kebijakan Publik
Sumber: Dunn (2016), dielaborasi oleh penulis

Gambar 1. memberikan informasi bahwa sebelum kebijakan ditetapkan, dan untuk menentukan pilihan kebijakan semestinya rekomendasi dari berbagai alternatif kebijakan dipresentasikan melalui risalah kebijakan. Posisi kebijakan yang digariskan dalam ringkasan kebijakan kemudian diperluas, dijelaskan dan dirasionalisasikan dalam rekomendasi kebijakan, dan merupakan sumber utama rincian di mana informasi kunci pada topik masalah dapat di akses. Hal ini menyebabkan risalah kebijakan menjadi jawaban untuk meningkatkan kualitas sebuah kebijakan, namun kenyataannya risalah kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintah tidak menunjukkan kualitas dan model kebijakan yang jelas (Loftis & Mortensen, 2017; Smith, 2018:21; Pennock, 2019:65). Akibat nya terjadi banyak kebijakan tidak merepresentasikan tujuan utama yang ingin dicapai, dan terkesan bahwa kebijakan hanyalah sebuah aturan yang harus dipatuhi (Jagers, Matti, & Nordblom, 2019). Pilihan kebijakan kemudian mengidentifikasi serangkaian alternatif bagi pembuat kebijakan untuk dipertimbangkan. Ini adalah inti dari dokumen, di mana alternatif diuraikan dan dievaluasi sambil memberikan bukti pendukung empiris. Agar rekomendasi kebijakan menjadi koheren, harus diklarifikasi dan

memberikan rekomendasi baik secara normatif maupun pragmatis. Pilihan kebijakan harus kredibel, dan ide-ide yang paling jelas, serta menguraikan kekuatan dan kelemahan masing-masing posisi kebijakan.

Agar kebijakan berkualitas baik beberapa model kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan objek kebijakan itu sendiri, diilustrasikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Model Kebijakan Publik

No	Model Kebijakan	Keterangan
1.	<i>Process Model</i>	Model proses memandang pembuatan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan politik.
2.	<i>Institutional Model</i>	Model institusional memusatkan perhatian pada efek lembaga-lembaga politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik.
3.	<i>Rational Model</i>	Model rasional menyiratkan bahwa pemerintah harus memilih kebijakan yang memaksimalkan keuntungan masyarakat dan meminimalkan biaya.
4.	<i>Incremental Model</i>	Model <i>incremental</i> melihat kebijakan publik sebagian besar sebagai kelanjutan dari kegiatan pemerintah masa lalu dengan hanya memodifikasi atau tambahan kegiatan.
5.	<i>Group Model</i>	Teori kelompok memandang kebijakan publik sebagai hasil dari perjuangan di antara kelompok masyarakat.
6.	<i>Elite Model</i>	Model elit memandang kebijakan publik sebagai dampak dari institusi politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik.
7.	<i>Public Choice Model</i>	Teori pilihan publik menggunakan analisis ekonomi untuk mempelajari kebijakan publik.
8.	<i>Game Theory Model</i>	Teori permainan menggambarkan kebijakan sebagai hasil interaksi antara dua atau lebih peserta yang rasional.

Sumber: Dye (2013:15-30)

Model digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan menopang pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar. Studi baru-baru ini mengonfirmasi bahwa penerimaan model dipengaruhi oleh kombinasi karakteristik model, infrastruktur pendukung dan faktor organisasi (Kolkman et al., 2016). Walaupun penggunaan model dalam kebijakan telah dikatakan gagal dalam potensinya (Kolkman et al., 2016), namun beberapa praktisi dan akademisi terus memberikan saran kriteria untuk mendorong penggunaan model dalam kebijakan, misalnya model dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keuangan, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan (Estrada & Yap, 2013). Model dapat bergantung pada proses pembelajaran sosial (Ittersum & Sterk, 2015), kriteria kualitas, traktabilitas (penyelesaian masalah melalui analisis komputer), efisiensi dan fleksibilitas (Kolkman et al., 2016), dan metodologi pemodelan (Furtado, Fuentes, & Tessone, 2019; Fuentes, Tessone, & Furtado, 2019). Model dalam kebijakan apapun pasti melekat substansi masalah, proses yang perlu dilakukan, dan konteks di mana upaya untuk mengatasi persoalan itu berlangsung (Santoso, 2010; Armstrong, 2019).

Pemodelan Kebijakan Dalam Risalah Kebijakan

Pemodelan kebijakan dapat mengembangkan kebijakan publik berkelanjutan yang memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, karena pemodelan adalah sebuah proses, cara atau kegiatan pembuatan model. Pemodelan kebijakan bertujuan mencari cara efektif untuk analisis dan evaluasi kebijakan yang melahirkan rekomendasi kebijakan yang dipilih. Pada kasus yang menyangkut kepentingan umum kebijakan sepertinya selalu berorientasi keuntungan yang dimainkan oleh para politisi atau jabatan politisi (Batley & Mcloughlin, 2015). Pemodelan kebijakan akan tergantung kepada instrumen kebijakan itu sendiri, diilustrasikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Instrumen dan Pemodelan Kebijakan

No	Instrumen	Pemodelan Kebijakan
1.	Investasi langsung, fiskal / keuangan, instrumen berbasis pasar	Ekonomi
2.	Advokasi implementasi pendidikan; penyediaan informasi, label kinerja, pelatihan profesional dan kualifikasi	Informasi dan Pendidikan
3.	Pembentukan institusi, perencanaan strategis	Dukungan Kebijakan
4.	Program penelitian, demonstrasi dan publikasi (hasil penelitian)	Penelitian dan Pengembangan
5.	Difusi, adopsi, penelitian, kreativitas,	Inovasi

Sumber: Elaborasi penulis (2019)

Pada artikel penelitian ini diberikan contoh pemodelan kebijakan “inovasi” dalam risalah kebijakan diilustrasikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemodelan Kebijakan Inovasi

Isu Kebijakan (Masalah)	Model Kebijakan	Pemodelan Kebijakan	Input Pemodelan	Institusi/ Lembaga Terkait	Pilihan Kebijakan dan Rekomendasi
Pelayanan Publik, Tata kelola, Efisiensi Organisasi, Transparansi, Kolaborasi, Partisipasi, Kebijakan yang buruk.	<i>Incremental Model</i>	Inovasi	Teknologi Informasi, Organisasi, Hukum, Keuangan, Administrasi publik, Sumber daya manusia.	Pemerintah Pusat /Daerah, Balitbang, Institusi Pendidikan Tinggi, Sektor Swasta, Masyarakat.	

Sumber: Elaborasi penulis (2019)

Isu kebijakan atau masalah yang teridentifikasi merupakan syarat untuk menemukan berbagai alternatif solusi. Masalah-masalah tersebut terjadi karena adanya faktor pencetus, dalam lingkup birokrasi faktor pencetus sering diakibatkan oleh ketidakmampuan organisasi untuk menjalankan fungsinya, intervensi politik, *spoil system*, dan kebijakan yang buruk. Oleh sebab itu muncul konsep inovasi untuk merespon buruknya kinerja birokrasi. Idealnya dari sisi tujuan dalam lingkup birokrasi pemerintah, inovasi dapat menekan masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (Klareskov & Nikolov, 2007:44). Berkontribusi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi (Tohidi & Jabbari, 2012). Lingkup pelayanan, inovasi dipercaya akan meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien (Vries, Bekkers, & Tummers, 2015).

Sebagai contoh, untuk menjalankan inovasi diperlukan kebijakan sebagai pedoman pelaksana agar tujuan awal penerapan inovasi dapat tercapai. Daniels, Ustyuzhantseva, dan Yao (2017) dengan penyelidikannya di negara BRICS (*Brazil, Russia India, China and South Africa*) menemukan, tidak ada kebijakan publik khusus dan dukungan kebijakan mengakibatkan kesenjangan dan ketidakmampuan untuk mengkonseptualisasikan inovasi sebagai mekanisme yang lebih luas dalam aktivitas pemerintah, sosial-ekonomi dan pembangunan, atau kurangnya penghargaan terhadap peran potensial yang dapat dimainkan inovasi dalam pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan berbagai kebijakan pendukung inovasi dengan menggunakan *dynamic system model*. Bérard, Cloutier, dan Cassivi (2016) dalam studinya menyimpulkan *dynamic system model* dapat membangun hubungan kausalitas yang diperlukan dalam proses awal kebijakan, dan juga mencakup semua entitas hubungan utama kausalitas. Model ini juga sebagai alat mendukung

setiap keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji efektivitas berbagai skenario kebijakan. Di sisi lain *dynamic system model* dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk pengembangan kebijakan. Oleh sebab itu penggunaan *dynamic system model* akan lebih mungkin terjadi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, dengan mempertimbangkan efek dari kebijakan itu sendiri.

Selain itu adopsi inovasi pada umumnya menggunakan teknologi, peluang inklusivitas pemerintah dengan pemanfaatan teknologi mendorong mekanisme kerja yang lebih mudah. Adopsi, asimilasi dapat memertahankan peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Terlepas dari monopoli pemerintah dalam pelayanan publik, perubahan untuk melaksanakan berbagai bentuk inovasi dengan teknologi memerlukan dorongan dari berbagai kebijakan pendukung. Pemanfaatan teknologi akan memaksa institusi untuk menyesuaikan diri, termasuk penyesuaian kapasitas pengetahuan aparatur birokrasi sebagai pelaksana (Dolfsma & Seo, 2013). Ketika institusi memutuskan untuk mengadopsi berbagai bentuk teknologi dalam aktivitasnya, maka prosedur yang panjang dapat diperpendek, dan waktu pelayanan dapat dipersingkat. Di sisi lain teknologi tidak dapat digerakkan sepenuhnya oleh peralatan teknologi lain, oleh sebab itu sumber daya manusia masih menduduki peran yang sangat penting. Aparatur birokrasi akan selalu membutuhkan pengetahuan baru dengan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis operasionalisasi penggunaan teknologi tersebut. Proses tersebut seperti mata rantai yang kompleks di mana praktik inovasi didorong oleh pemanfaatan teknologi dan cara-cara yang inovatif. Sedangkan cara inovatif memerlukan pengetahuan yang cukup, pengetahuan akan memberikan reaksi ketika terjadi stimulus berpikir untuk menemukan ide/cara yang dianggap baru.

Untuk menuju ke arah pemanfaatan teknologi yang lebih baik diperlukan kolaborasi dengan berbagai sistem dan kerjasama dengan pihak lain untuk keuntungan bersama. Selain itu pemerintah juga mendapatkan keuntungan dengan mempermudah akses masyarakat untuk berinteraksi. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses menciptakan, memelihara berbagai pengetahuan inovasi. Penggunaan teknologi juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Shkabatur, 2013; Ingrams, 2017). Secara tradisional, transparansi terkait dengan masalah keterbukaan informasi dari pemerintah, transparansi juga ditafsirkan sebagai fungsi pengawasan dalam aktivitas pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi publik terletak pada nilai rasional dan manfaatnya. Dapat diadopsi dari sumber eksternal atau ditransfer dari sumber internal dengan belajar dari pengalaman masa lalu, atau dengan difusi untuk mendapatkan praktik terbaik yang diadopsi dari tempat berbeda. Lebih lanjut pemanfaatan teknologi saat ini merupakan kebutuhan yang objektif meningkatkan efisiensi, modifikasi, dan penambahan pemanfaatan teknologi dengan menyesuaikan kebutuhan institusi. Artinya ada beberapa pihak yang diuntungkan, bagi sektor swasta kerjasama dengan pemerintah juga akan menambah keuntungan dan promosi secara tidak langsung. Oleh sebab itu teknologi dapat dideskripsikan sebagai salah satu agen perubahan dalam aktivitas pemerintah yang berinteraksi dalam zona "ekonomi" di bawah infrastruktur lembaga tertentu (pemerintah dan swasta) dan terlibat dalam upaya-upaya difusi, dan komersialisasi (Dolfsma & Seo, 2013; Navarro, 2016).

Ringkasan Eksekutif Kebijakan Inovasi Dalam Risalah Kebijakan

"Sangat penting meningkatkan legitimasi pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Bahwa pelayanan publik, tata kelola, efisiensi organisasi, transparansi, kolaborasi, partisipasi, dan kebijakan yang buruk sering menjadi sebab tugas dan fungsi pemerintah tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas aktivitas pemerintah dengan menerapkan berbagai adopsi inovasi adalah kurangnya sumber daya manusia pelaksana, dan kebijakan pendukung. Hal ini memerlukan tindakan pemerintah yang

komprehensif, memperluas penelitian dan inovasi, dan mendorong pemerintah daerah, serta mempertahankan kolaborasi sektor swasta, dan partisipasi masyarakat”.

Ringkasan eksekutif di atas memberikan informasi bahwa kebijakan inovasi membutuhkan pengaturan yang lebih lanjut untuk memberikan pengaruh yang lebih baik dengan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini melibatkan kemampuan pemerintah dari sistem inovasi nasional melalui dukungan langsung yang dirancang dengan baik dan peran yang lebih besar untuk sektor publik sebagai mitra inovasi. Ada kebutuhan untuk lebih fokus pada evaluasi instrumen kebijakan untuk memastikan memenuhi tujuan dan memberikan nilai keuntungan. Organisasi publik dapat berinovasi untuk meningkatkan legitimasi dengan cara adopsi atau tidak sepenuhnya mengadopsi inovasi. Dengan demikian, implementasi, penggunaan, dan pengelolaan suatu inovasi adalah aspek penting untuk organisasi publik (Walker, 2014). Inovasi juga bisa berupa kegiatan pro aktif (jemput bola), lebih berupaya secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dengan kegiatan aksi nyata dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dilakukan atau pengembangan cara baru dengan mengadopsi dari tempat yang berbeda.

Pemerintah juga mesti selalu mendorong dan memperkuat kapasitas inovasi sektor publik untuk mempromosikan inovasi. Dalam pembuatan kebijakan, praktik bisnis dan penelitian akademis, ada banyak minat pada faktor-faktor yang mempromosikan inovasi, terutama penelitian dan pengembangan (R&D), akuisisi teknologi dan konteks kelembagaan eksternal. Di sisi yang lain mesti juga memperhatikan peran sumber daya manusia internal, atau keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan aparatur pelaksana, sebagai sumber penting untuk inovasi dalam institusi pemerintah. Inovasi dipandang sebagai solusi yang layak untuk tantangan masalah-masalah pemerintah, ekonomi dan sosial yang memerlukan instrument kebijakan yang efektif untuk mempromosikannya. Dampak dari setiap instrumen kebijakan inovasi cenderung tergantung pada kerja dari sistem inovasi yang lebih luas. Sejumlah besar variabel yang mempengaruhi dampak instrumen kebijakan inovasi berasal dari berbagai sumber pengetahuan yang terkait seperti interaksi dengan intervensi pembuat kebijakan, kondisi implementasi, kemampuan lokal dan nasional, struktur ekonomi, badan inovasi daerah / nasional, pengembangan pasar keuangan, dan faktor budaya, misalnya sikap terhadap keterbukaan, interaksi, pengambilan risiko, dan eksperimen (Edler & Fagerberg, 2017).

Dampak kebijakan seperti potensi kreatif lokal dapat dimobilisasi untuk meningkatkan inovasi dalam aktivitas pemerintah (Trojer, Rydhagen, & Kjellqvist, 2014). Namun proses inovasi dalam aktivitas pemerintah tidak dengan mudah dapat direalisasikan karena akan dihadapkan pada beberapa elemen yang dapat melemahkan proses inovasi itu sendiri. Beberapa diantaranya seperti kebijakan (Patanakul & Pinto, 2014), inovasi merupakan tugas pemerintah daerah agar lebih efisien (Bai & Li, 2011). Studi literatur yang dilakukan oleh Cinar, Trott, dan Simms (2018) menemukan bahwa ada kebutuhan untuk mengenali kegiatan inovasi yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, juga manajemen dan proses yang tidak efektif dapat menghambat inovasi. Studi yang lain juga menyarankan beberapa cara praktis untuk memperkuat inovasi seperti mengelola inovasi sebagai suatu proses, pengelolaan yang baik akan dimanifestasikan dengan serangkaian fungsi manajemen untuk mengerakkan perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Bereksperimen berarti melakukan simulasi berbagai kegiatan yang mengarah kepada pilihan inovasi yang tepat (Stewart-Weeks & Kastle, 2015).

Pentingnya kebijakan inovasi diakui secara luas, hal ini juga sangat terkait dengan kebijakan nasional lainnya, seperti kebijakan tentang reformasi birokrasi, pemerintah daerah, pelayanan publik, dan sebagainya. Peran inovasi adalah mengubah hasil penelitian menjadi layanan dan produk baru (kebijakan, layanan, proses) yang lebih baik agar tetap kompetitif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai kegiatan pemerintah dengan memudahkan segala urusan. Selain itu pemerintah daerah harus merangsang dan memfasilitasi lebih banyak inisiatif inovasi tingkat lokal, karena sistem inovasi nasional yang kuat harus terdiri dari “kantong” inovasi di beberapa daerah dengan berbagai program dan inisiatif oleh

pemerintah daerah yang memanfaatkan ketersediaan sumber inovasi lokal. Inisiatif lokal cenderung menjadi cara yang lebih berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk memberikan manfaat secara cepat yang diperlukan untuk menghasilkan inovasi yang lebih nyata dan luas (Damuri, Aswicahyono, & Christian, 2018:123).

KESIMPULAN

Pemodelan kebijakan mesti dilakukan dengan input yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, sektor, dan lembaga dalam kerangka kerja sistem yang kompleks dengan tambahan berupa pengungkapan dampak kebijakan dalam skala besar secara adaptif. Pemodelan kebijakan menetapkan pentingnya pemodelan sebagai strategi teori, kemudian penelitian. Pemodelan dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi sistem pengaturan kepentingan pemerintah yang sangat kompleks, informasi yang berlebihan, peningkatan kepraktisan dan penerapan eksperimen penelitian untuk memberikan rekomendasi kebijakan.

Pemodelan kebijakan dalam risalah kebijakan merupakan informasi primer untuk menentukan kebijakan secara politis. Keuntungan dan kerugian dari implementasi kebijakan mesti diperhatikan, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan norma dan sampai kepada tujuannya. Dengan adanya pemodelan kebijakan yang bervariasi dalam risalah kebijakan (sesuai dengan fenomena masalah yang teridentifikasi) akan lebih mudah mengidentifikasi obyek dari kebijakan itu sendiri. Tidak hanya proses dalam menulis risalah kebijakan yang singkat dan jelas, lebih dari pada itu integrasi metodologi pemodelan kebijakan sangat bermanfaat untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan. Untuk itu bagi pemerintah risalah kebijakan harus melayani peran yang berbeda dari peran prediksi dan optimisasi yang biasanya dilayani oleh opsi kebijakan. Opsi Kebijakan terkait dan dirancang untuk mengevaluasi kebijakan yang ada atau potensial untuk mencapai sasaran kebijakan.

REKOMENDASI

1. Risalah kebijakan (*policy brief*) yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan juga terkait dalam kegiatan menganalisis faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan hingga menghasilkan alternatif kebijakan dan mengajukan rekomendasi;
2. Pemodelan kebijakan memperkuat kapasitas inovasi dengan pengaturan kebijakan, dan penerapan berbagai unsur yang terlibat;
3. Bagi peneliti masa depan, minimal artikel ini dapat menjadi penelitian pendahuluan (*preliminary research*) agar dapat menguraikan pemodelan kebijakan dalam konteks empiris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel penelitian ini didukung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Bapak Mhd. Ridwan, SE., M.Si), sebagai upaya untuk mempersiapkan analis kebijakan Kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Action, Research. (2018, October 27). *How to Plan, Write and Communicate an Effective Policy Brief: Three Steps to Success*. Dari Research to Action: <https://www.researchtoaction.org/2014/10/plan-write-communicate-effective-policy-brief-three-steps-success/>, diakses pada tanggal 05 September 2019.
- Armstrong, J. H. (2019). Modeling Effective Local Government Climate Policies That Exceed State Targets. *Energy Policy*, 132, 15-26. doi:10.1016/j.enpol.2019.05.018

- Bai, J., & Li, J. (2011). Regional Innovation Efficiency in China: The Role of Local Government. *Innovation: Management, Policy & Practice*, 13(2), 142-153. doi:10.5172/impp.2011.13.2.142
- Barnett, E., & Thomas, J. (2009). *Methods for the Synthesis of Qualitative Research: A Critical Review*. National Centre for Research Methods Working Papers Series, (EPPI-)Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, London.
- Batley, R., & Mcloughlin, C. (2015). The Politics of Public Services: A Service Characteristics Approach. *World Development*, 74, 275-285. doi:10.1016/j.worlddev.2015.05.018
- Bérard, C., Cloutier, L. M., & Cassivi, L. (2016). The Effects of Using System Dynamics-Based Decision Support Models: Testing Policy-Makers' Boundaries in a Complex Situation. *Journal of Decision Systems*, 26(1), 45-63. doi:10.1080/12460125.2016.1204212
- Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. (2018). A systematic Review of Barriers to Public Sector Innovation Process. *Public Management Review*, 20, 1-28. doi:10.1080/14719037.2018.1473477
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2014). *Public Policy: Perspectives and Choices*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Conaway, C. L. (2013). The Problem with Briefs, in Brief. *Education Finance and Policy*, 8(3), 287-299. doi:10.1162/EDFP_a_00096
- Coning, C. d., Lurås, H., Schia, N. N., & Ulriksen, S. (2010). *Norway's Whole-of-Government Approach: Challenges for Engagement with Afghanistan and Other Fragile States*. Oslo: Norwegian Institute of International Affairs (NUPI).
- Damuri, Y. R., Aswicahyono, H., & Christian, D. (2018). Innovation Policy in Indonesia. In M. Ambashi, *Innovation Policy in ASEAN* (pp. 96-127). Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
- Daniels, C. U., Ustyuzhantseva, O., & Yao, W. (2017). Innovation for Inclusive Development, Public Policy Support and Triple Helix: Perspectives From BRICS. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 9(5), 513-527. doi:10.1080/20421338.2017.1327923
- Dolfsma, W., & Seo, D. (2013). Government Policy and Technological Innovation-a Suggested Typology. *Technovation*, 33(6-7), 173-179. doi:10.1016/j.technovation.2013.03.011
- Downes, T., & Killeen, K. M. (2013). Introduction to the Policy Brief Special Issue. *Education Finance and Policy*, 8(3), 271-274. doi:10.1162/EDFP_e_00094
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis* (5th ed.). Oxon: Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation Policy: What, Why, and How. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 2-23. doi:10.1093/oxrep/grx001

- Estrada, M. A., & Park, D. (2018). The Past, Present and Future of Policy Modeling. *Journal of Policy Modeling*, 40(1), 1-15. doi:10.1016/j.jpolmod.2018.01.003
- Estrada, M. A., & Yap, S. F. (2013). The Origins and Evolution of Policy Modeling. *Journal of Policy Modeling*, 35(1), 170-182. doi:10.1016/j.jpolmod.2011.12.003
- Fowler, L. (2018). Problems, Politics, and Policy Streams in Policy Implementation. *Governance*, 32(3), 403-420. doi:10.1111/gove.12382
- Fuentes, M. A., Tessone, C. J., & Furtado, B. A. (2019). Public Policy Modeling and Applications. *Complexity*, 1-4. doi:10.1155/2019/4128703
- Furtado, B. A., Fuentes, M. A., & Tessone, C. J. (2019). Policy Modeling and Applications: State-of-the-Art and Perspectives. *Complexity*, 1-11. doi:10.1155/2019/5041681
- Hadna, A. H., & Kutanegara, P. M. (2017). *Tinjau Ulang Definisi, Parameter, dan Manajemen Data*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Hepburn, C., Pless, J., & Popp, D. (2018). Policy Brief-Encouraging Innovation that Protects Environmental Systems: Five Policy Proposals. *Review of Environmental Economics and Policy*, 12(1), 154-169. doi:10.1093/reep/rex024
- Hill, M. (2005). *The Public Policy Process* (4th ed.). Essex: Pearson Education.
- Ingrams, A. (2017). Transparency for Results: Testing a Model of Performance Management in Open Government Initiatives. *International Journal of Public Administration*, 00(0), 1-14. doi:10.1080/01900692.2017.1318400
- Ittersum, M. K., & Sterk, B. (2015). Computerized models: Tools for Assessing the Future of Complex Systems? In A. J. Jordan, & J. R. Turnpenny, *The Tools of Policy Formulation: Actors, Capacities, Venues and Effects* (pp. 100-120). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Jagers, S. C., Matti, S., & Nordblom, K. (2019). The Evolution of Public Policy Attitudes: Comparing The Mechanisms of Policy Support Across The Stages of a Policy Cycle. *Journal of Public Policy*, 1-21. doi:10.1017/S0143814X19000023
- Kay, A. (2006). *The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Keepnews, D. M. (2016). Developing a Policy Brief. *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 17(2), 61-65. doi:10.1177/1527154416660670
- Klareskov, V., & Nikolov, D. (2007). Eleven Innovations in Governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: A Synopsis. In D. o. Affairs, *Innovations in Governance in the Middle East, North Africa, and Western Balkans: Making Governments Work Better in the Mediterranean Region* (pp. 41-52). New York: United Nations.

- Kolkman, D. A., Campo, P., Balke-Visser, T., & Gilbert, N. (2016). How to Build Models for Government: Criteria Driving Model Acceptance in Policymaking. *Policy Sciences*, 49(4), 489-504. doi:10.1007/s11077-016-9250-4
- LIPI. (2018, Pebruari 26). *Luncurkan Policy Brief, Inilah Isi Rekomendasi LIPI bagi Kebijakan Pemerintah*. Dari LIPI: <http://lipi.go.id/berita/luncurkan-policy-brief-inilah-isi-rekomendasi-lipi-bagi-kebijakan-pemerintah/19989>, diakses pada tanggal 02 Nopember 2019.
- Loftis, M. W., & Mortensen, P. B. (2017). A Dynamic Linear Modelling Approach to Public Policy Change. *Journal of Public Policy*, 1-27. doi:10.1017/S0143814X17000186
- Minkman, E. (., Buuren, M. W., & Bekkers, V. J. (2018). Policy Transfer Routes: An Evidence-Based Conceptual Model to Explain Policy Adoption. *Policy Studies*, 39(2), 222-250. doi:10.1080/01442872.2018.1451503
- Navarro, F. M. (2016). From Government Innovation to Public Innovation. *International Journal of New Technology and Research (IJNTR)*, 2(6), 4-7.
- Overton, W. F., & Müller, U. (2013). Metatheories, Theories, and Concepts in the Study of Development. In R. M. Lerner, M. A. Easterbrooks, & J. Mistry, *Handbook of psychology* (pp. 19-58). Hoboken, NJ: Wiley.
- Patanakul, P., & Pinto, J. K. (2014). Examining the Roles of Government Policy on Innovation. *Journal of High Technology Management Research*, 25(2), 97-107. doi:10.1016/j.hitech.2014.07.003
- Paterson, B. L., Thorne, S. E., Canom, C., & Jillings, C. (2001). *Meta-Study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-Analysis and Meta-Synthesis*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
- Pennock, A. (2019). *The CQ Press Writing Guide for Public Policy*. Washington: CQ Press.
- Santoso, P. (2010). *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government (PolGov-UGM).
- Shkabatur, J. (2013). Transparency With (Out) Accountability: Open Government in the United States. *Yale Law & Policy Review*, 31(1), 1-66. Dari <http://digitalcommons.law.yale.edu/ylpr/vol31/iss1/4>, diakses pada tanggal 05 September 2019.
- Smith, C. F. (2018). *Writing Public Policy: A Practical Guide to Communicating in the Policymaking Process*. Oxford: Oxford University Press.
- Stewart-Weeks, M., & Kastle, T. (2015). Innovation in the Public Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 74(1), 63-72. doi:10.1111/1467-8500.12129
- Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). Innovation as a Success Key for Organizations. *Procedia Technology*, 1(1), 560-564. doi:10.1016/j.protcy.2012.02.122

- Trojer, L., Rydhagen, B., & Kjellqvist, T. (2014). Inclusive Innovation Processes-Experiences from Uganda and Tanzania. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 6(4), 425-438. doi:10.1080/20421338.2014.970437
- Utomo, T. W. (2017). *Merancang Policy Brief: Bahan Ajar Diklatpin Tingkat I*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Diklat Aparatur LAN RI.
- Vries, H. d., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). Innovation in the Public Sector: A Systematics Review and Future Research Agenda. *Public Administration*, 94(1), 146-166. doi:10.1111/padm.12209
- Walker, R. M. (2014). Internal and External Antecedents of Process Innovation: A Review and Extension. *Public Manajemen Review*, 16(1), 21-44. doi:10.1080/14719037.2013.771698
- Young, E., & Quinn, L. (2017). *An Essential Guide to Writing Policy Briefs*. Berlin: International Centre for Policy Advocacy (ICPA).
- Zhao, S. (1991). "Metatheory, Metamethod, Meta-Data Analysis: What, Why, and How?". *Sociological Perspectives*, 34(3), 377-390. doi:10.2307/1389517